

Implementasi Program Pengembangan Destinasi Lewat Pelatihan Kuliner Dan Pengemasan Di Objek Wisata Bukit Kasih Kanonang

Yosua Daniel Rawis¹

Ventje Kasenda²

Novie R. Pioh³

Email Korespondensi: ventjekasenda@unsrat.ac.id

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui bagaimana program pengembangan Dinas Pariwisata Daerah Provinsi Sulawesi Utara kepada komunitas masyarakat pelaku usaha kecil di Objek Wisata Religi Bukit Kasih Kanonang. Kepariwisataan di Sulawesi Utara berlandaskan pada Undang-Undang No 10 Tahun 2009 bahwa penyelenggaraan pembangunan kepariwisataan di Indonesia harus berdasarkan asas: manfaat, kekeluargaan, adil dan merata, keseimbangan, kemandirian, kelestarian, partisipatif, berkelanjutan, demokratis, kesetaraan, dan kesatuan, yang semuanya diwujudkan melalui pelaksanaan rencana pembangunan kepariwisataan dengan memperhatikan keanekaragaman, keunikan, dan kekhasan budaya dan alam, serta kebutuhan manusia untuk berwisata. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Hasil penelitian disimpulkan bahwa Implementor program destinasi yaitu Dinas Pariwisata Daerah Provinsi Sulawesi Utara telah merealisasikan kegiatan dalam pemberdayaan manusia pada tahun 2019 dalam upaya meningkatkan keterampilan dan dalam rangka pengentasan kemiskinan. Bagaimana keberlangsungannya, kenyataannya efek dari program tersebut kembali lagi kepada masyarakat yang bisa dilihat saat-saat sekarang. Masyarakat belum tentu mewujudkan *income* yang diharapkan. Karena melihat implementor belum jelas, apakah terus mengawasi guna melihat efeknya kedepan atau apakah hanya sebatas kegiatan seremoni untuk dokumentasi.

Kata Kunci : Implementasi, Program, Wisata, Bukit Kasih

¹Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan FISPOL-Unsrat

² Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan FISPOL-Unsrat

³ Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan FISPOL-Unsrat

Pendahuluan

Pada tahun 2019 masyarakat pelaku usaha kecil diberdayakan dalam Program Pengembangan Destinasi lewat Pelatihan Kuliner dan Pengembangan Program ini diselenggarakan oleh Dinas Pariwisata Daerah Provinsi Sulawesi Utara dan merangkul Pemerintah Desa Kanonang Dua sebagai mitra karena Pemerintah Desa Kanonang Dua yang adalah wilayah administratif Kawasan Pariwisata Bukit Kasih Kanonang. Program ini diadakan karena melihat potensi sumberdaya alam yang memadai sedangkan tidak di iringi dengan sumberdaya manusia yang memadai. Pelatihan Kuliner dan Pengemasan bertujuan untuk memberdayakan masyarakat miskin terutama masyarakat pelaku usaha kecil yang melakukan usaha di Objek Wisata Bukit Kasih Kanonang. Pelaku usaha ini umumnya penjual souvenir dan rumah makan kecil, tapi karena tidak dibarengi dengan keterampilan yang memadai akhirnya produk dan kemasan yang dihasilkan tidak menghasilkan baik padahal ada potensi lebih yang ditarik dan dimanfaatkan. Dalam penelitian ini ada beberapa indikator mengapa program pengembangan lewat Pelatihan dan Kuliner harus diadakan antara lain:

- a) Kesejahteraan terkait kemiskinan, umumnya komunitas usaha masyarakat Kanonang yang ada di Destinasi Wisata Religi Bukit Kasih adalah golongan masyarakat miskin atau masyarakat dengan tingkatan ekonomi yang rendah.
- b) Kurangnya Pengetahuan dan Keterampilan, pada umumnya masyarakat pelaku usaha adalah masyarakat yang bukan dari golongan terpelajar atau akademisi, masyarakat masih mengandalkan pengalaman

sendiri dan merasa kurang perlu adanya pelayanan prima, karena merasa pekerjaannya tidak harus di dasari dengan profesionalitas kerja.

Produk lokal kurang kompeten untuk dapat bersaing di pasaran, kurangnya kesadaran akan kompetensi dan adanya dorongan untuk dapat mengembangkan produk, juga karena di dasari oleh komunitas masyarakat *non-akademisi*.

Keterbatasan modal usaha dan kurangnya kompetensi dalam bidang terkait menjadi salah satu faktor yang membuat nilai produk dan kemasan kuliner tidak memikat bagi wisatawan baik lokal maupun mancanegara, sehingga menjadi pengaruh juga terhadap daya tarik dan *income* pendapatan bagi masyarakat pelaku usaha kecil yang ada di desa Kanonang pada umumnya.

Ada beberapa produk dan kemasan yang hanya di jajakan tanpa pengelolaan yang kreatif seperti beberapa produk kuliner lokal seperti kacang, jagung dan kue juga kerajinan tangan yang tidak di barengi dengan keterampilan sehingga tidak memiliki daya karena sangat tradisional selain itu untuk pengelolaan souvenir masyarakat tidak bisa memproduksi sendiri padahal produk kerajinan dari kayu dan tempurung kelapa bisa diolah sendiri, sehingga produk kerajinan tangan yang di jajakan ada bukan sari hasil produksi dari masyarakat melainkan di pasok dari luar, padahal untuk ketersediaan bahan ada olahan bisa di temukan di kebun masyarakat.

Pada tahun 2019 Dinas Pariwisata Daerah Provinsi Sulawesi Utara yang dimotori oleh Kepala Dinas Daniel Mewengkang dan Kepala Bidang Pengembangan Destinasi Jhon H Paerunan bersama Pemerintah Desa Kanonang Dua oleh Hukum

Desa Kanonang Dua Welly Rawis, dan dihadiri oleh beberapa pemerintah Desa Kanonang Ray juga Camat Kawangkoan Barat, melaksanakan program pengembangan destinasi lewat Pelatihan Kuliner dan Pengemasan selama 4 Hari di Resort Tateli dan Penutupan diadakan di Bukit Kasih Kanonang, program ini merangkul masyarakat desa Kanonang Dua sebagai masyarakat lokal wilayah administratif Bukit Kasih juga mengikutkan sertakan beberapa masyarakat yang ada di Kanonang Raya, masyarakat diarahkan untuk melakukan berbagai pelatihan. Pada Tahun 2018 sebelumnya sudah diadakan Bimbingan Teknis dan di lanjutkan pada Program Pelatihan dan Pengemasan pada 2019 sehingga di tinggal di implementasikan terkait pelatihannya. Masyarakat yang hadir dibekali dengan fasilitas berupa alat masak dan alat bordir kayu, selanjutnya dengan pelatihan mengelola kuliner seperti Cake Corn, Kacang Kemasan dan Souvenir dari kerajinan tangan.

Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Fokus dalam penelitian ini menggunakan teori dari Edward III tentang model implementasi kebijakannya bahwa keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh faktor-faktor sebagai berikut:

1. Komunikasi
2. Sumber Daya
3. Disposisi
4. Struktur Birokrasi

informan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kepala Bidang Destinasi
2. Hukum Tua Desa Kanonang Dua

3. Analisis Kebijakan Muda (Bid. Pengembangan Destinasi)
 4. Pihak Pengelolah Bukit Kasih
 5. 2 Orang Masyarakat Pelaku Usaha Kecil
 6. Pengunjung Bukit Kasih
- Metode Pengumpulan data adalah sebagai berikut:

1. Observasi
2. Wawancara
3. Dokumentasi

Langkah-langkah analisis data menurut Miles dan Huberman (1992:15-19), adalah sebagai berikut :

1. Pengumpulan Data
2. Reduksi data
3. Penyajian Data
4. Kesimpulan

Pembahasan

1. Komunikasi

Komunikasi dalam kebijakan sangat berpengaruh terhadap harmonisasi dari setiap pemangku kepentingan yang ada. Komunikasi berperan untuk membentuk karakter sikap pelaksana yang solid, tentunya komunikasi yang dimaksud dalam hal ini adalah pelaku kebijakan atau implementor yaitu Dinas Pariwisata Daerah Provinsi Sulawesi Utara dan Pemerintah Desa Kanonang Dua.

Penyampaian informasi yang jelas dari sikap pelaksana terkait kepentingan masyarakat lewat akumulasi data yang bisa diperoleh dari pemerintah lokal, akan berdampak baik dan mengarah kepada kebijakan yang tepat sasaran

Bukit Kasih sendiri dikelola Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Daerah Provinsi Sulawesi Utara sesuai Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 53 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi

Sulawesi Utara. Berdasarkan Undang-undang No 5 Tahun 2005 bahwa status tanah objek wisata Bukit Kasih Kanonang adalah tanah negara dan tanah Provinsi Sulawesi Utara.

Komunikasi mempunyai peran penting agar terselenggaranya kebijakan yang efisien terhadap masyarakat, komunikasi yang baik antar pihak pelaksana akan menciptakan harmoni pemerintahan yang baik. Program pengembangan destinasi lewat pelatihan kuliner dan pengemasan, dapat terselenggara karena peran implementor, pemerintah lokal dan masyarakat, dan komunitas masyarakat bisa berkoordinasi dengan baik.

Lewat komunikasi yang baik pihak implementor bisa mengakumulasi setiap keluhan permasalahan yang mendasar pada masyarakat, terlebih di Objek Wisata Bukit Kasih Kanonang, dimana masyarakat pelaku usaha kecil diberdayakan. Diberdayakannya masyarakat lewat Pelatihan Kuliner dan Pengemasan dalam program pengembangan destinasi ini dilihat penting, karena kemajuan pariwisata suatu daerah dapat dilihat dari kualitas sumber daya manusia yang baik, seperti pendapat yang di sampaikan oleh informan Analisis Kebijakan Muda (Bid. Pengembangan Destinasi) sesuai dengan Kebijakan pemerintah dan Dinas Pariwisata sebagai implementor memang sudah seharusnya selalu memerhatikan pengembangan kepariwisataan terlebih yang di pedesaan, ini sejalan dengan Peraturan Menteri Pariwisata Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2015, pengembangan wisata berbasis pedesaan (desa wisata) akan menggerakkan aktivitas ekonomi pariwisata di pedesaan (Kementerian Pariwisata, 2021).

Lewat komunikasi yang baik, pelaksana dapat melihat sasaran kebijakan yang benar-benar menyentuh langsung kepada masyarakat, seperti masalah yang terkait untuk diberdayakan di kawasan wisata Bukit Kasih Kanonang yaitu terkait sumberdaya manusia yang ada belum mampu menghasilkan produk yang berkualitas.

Pihak Dinas Pariwisata Daerah Provinsi Sulawesi Utara sejauh telah berupaya mewujudkan program pengembangan destinasi dengan merangkul pihak pemerintah lokal untuk dapat mengakomodir masyarakat yang pelaku usaha kecil yang ada di Bukit Kasih Kanonang, pada tahun 2018 sebelumnya sudah diadakan Program Pengembangan Destinasi Lewat Pelatihan Kuliner dan Souvenir, pihak Dinas Pariwisata sudah terlebih dahulu melakukan sosialisasi dan bimbingan teknis yang di adakan di Bukit Kasih Kanonang terkait Pelatihan Kuliner dan Souvenir yang kemudian di realisasikan pengembangannya pada tahun 2019 lewat Program Pengembangan Destinasi lewat Pelatihan Kuliner dan Pengemasan, dimana berbagai elemen Pemerintah Lokal terlebih khusus dimotori oleh Pemerintah Desa Kanonang Dua, tokoh pendidikan sebagai pembicara, Tim Penggerak PKK, Kelompok Sadar Wisata, dan 30 Masyarakat Pelaku Usaha di Bukit Kasih Kanonang. Ini menunjukkan implementasikan kebijakan ini bisa diwujudkan dari komunikasi yang baik dan dapat mewujudkan solidaritas dari setiap pemangku kepentingan

2. Sumberdaya

Sumber Daya merupakan hal yang penting, tanpa adanya sumber daya yang baik semua tidak akan baik-baik, kebijakan yang efektif, efisien dan tepat sasaran semua datangnya dari

sumber daya manusia yang baik, begitu juga bagi masyarakat pelaku usaha di Bukit Kasih Kanonang, kualitas sumber daya masyarakat dapat dilihat dari produk yang dibuat, pengolahan yang sederhana dan tradisional tanpa pengemasan, souvenir yang familiar bukan dari produksi sendiri, mencerminkan sumberdaya manusia yang belum maksimal.

Untuk sekelas kawasan wisata Bukit Kasih yang sudah terkenal di regional, nasional dan internasional karena ke eksotisan alam yang ditawarkan sangat disayangkan apabila produk lokal yang ada tidak berkualitas karena tidak adanya pengolahan yang baik karena daya kreatifitas dan keterampilan, ini akan mengurangi atensi dari pengunjung, tentunya akan berimbas terhadap pendapat yang minim dan akhirnya mengarah kepada kemiskinan. Karena itu program pemberdayaan Lewat Pelatihan Kuliner dan Pengemasan diadakan, sekitar 30an masyarakat diberdayakan lewat pelatihan mengolah kuliner yang baik

Penjual Kuliner diajarkan membuat Selai Kacang, Cake Corn, Kripik dan cara pengemasannya agar terlihat cantik, Penjual Souvenir dilatih dengan keterampilan merangkai dan mengukir karya seni dari kayu, batok kelapa. Program ini untuk memberikan pelatihan yang memacuh kreatifitas dan keterampilan demi mengejar ketertinggalan karena pada dasarnya produk yang ada sangat tertinggal, kegiatan ini juga dilaksanakan karena keprihatinan pemerintah terhadap produk yang buruk tidak dapat mendatangkan *income* sehingga menjadi ekonomi yang lemah yang mengarah kepada kemiskinan.

3. Disposisi

Disposisi adalah sikap atau

kemauan para pelaksana kebijakan. Kemauan menentukan tingkat kesungguhan para pelaksana dalam bekerja. Sikap pelaksana merupakan hal yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan sebuah kebijakan. Hal ini berkaitan erat dengan kemampuan kerja serta kemauan para pegawai dalam melaksanakan kebijakan tersebut.

Melaksanakan suatu kebijakan diperlukan tidak hanya pegawai yang mempunyai kemampuan saja akan tetapi diperlukan juga pegawai yang memiliki kemauan keras dalam melaksanakan kebijakan. Para pelaksana kebijakan tidak hanya dituntut untuk mengetahui apa yang dilaksanakannya, tetapi juga dituntut untuk mempunyai kemauan keras dan motivasi tinggi yang menjadi dasar semangat untuk melaksanakan kebijakan.

Meskipun disposisi datang dari dalam diri para pelaksana kebijakan, bukan berarti kehadirannya tidak dipengaruhi oleh faktor-faktor lain. Beberapa hal yang dapat mempengaruhi sikap para pelaksana adalah pengetahuan dan pemahaman terhadap kebijakan dan tingkat urgensi masalah yang harus diselesaikan oleh kebijakan itu. Faktor lainnya adalah adanya insentif bagi pelaksana kebijakan.

4. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi mempengaruhi pelaksanaan kebijakan. Sebuah kebijakan memerlukan struktur birokrasi yang efisien agar bisa dilaksanakan dengan baik. Struktur birokrasi merupakan faktor keempat yang harus dipenuhi agar pelaksanaan suatu kebijakan berjalan dengan lancar, dua karakter yang menonjol dari struktur birokrasi ini adalah prosedur pelaksanaan yang baku dan fragmentasi/pembagian

wewenang.

Pembagian ini dilakukan untuk membatasi waktu dan sumber daya pelaksana dan keinginan akan keseragaman dalam organisasi yang kompleks dan menyebar luas. Fokus perhatian dari dimensi ini yaitu pembagian kerja, yang dimaksudkan disini adalah bahwa pembagian tanggung jawab bagi suatu kebijakan yang dilakukan oleh instansi pelaksana kebijakan sesuai dengan bidang yang sedang/akan dilaksanakan dalam suatu kebijakan.

Struktur Birokrasi di Dinas Pariwisata Daerah Provinsi Sulawesi dilaksanakan berdasarkan tupoksi dari setiap bidang, dalam pelaksanaan kebijakan sekretaris mewadahi setiap bidang dalam pelaksanaan program yang kemudian disepakati bersama Kepala Dinas. dalam pengambilan kebijakan terkait Pengembangan Destinasi lewat Pelatihan Kuliner dan Pengemasan, Bidang Pengembangan Destinasi berperan dalam pengambilan ide dan gagasan kemudian disepakati bersama dan di implementasikan sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP). Setiap program yang di implementasikan di obyek wisata di koordinasikan kepada pemerintah lokal yang terkait, seperti kebijakan pengembangan destinasi di Bukit Kasih dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pemerintah Desa sebagai otoritas wilayah otonom yang juga berperan mengakomodir masyarakat sebagai sasaran pemberdayaan yang bertujuan untuk menumbuhkan masyarakat yang kreatif, mandiri dan juga untuk ekonomi masyarakat untuk kemajuan wisata di Bukit Kasih Kanonang.

Penutup

Kesimpulan

1. Pengembangan destinasi lewat peningkatan sumber daya manusia pada masyarakat desa Kanonang di Bukit Kasih oleh Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Utara terealisasi pada tahun 2019. Pihak Dinas berkoordinasi dengan pemerintah desa Kanonang II untuk melibatkan masyarakat pelaku usaha di Bukit Kasih. Program pengembangan SDM seperti Pelatihan Kuliner dan Pengemasan ini untuk memberdayakan masyarakat. Karena sebelumnya masyarakat hanya mengelolah produk dengan kompetensi yang minim. Terobosan program pemerintah ini sebenarnya guna untuk pengentasan kemiskinan, ini sesuai program kerja pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, dibawah oleh Dinas Provinsi dalam program pengembangan destinasi lewat pemberdayaan sumber daya manusia, Yaitu lewat pelatihan "Kuliner dan Pengemasan".
2. Berdasarkan sumber daya manusia, program pengembangan destinasi lewat pelatihan kuliner ini tujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat sehingga berdampak pada berkurangnya angka kemiskinan di Sulawesi Utara terlebih khusus masyarakat Kanonang sebagai pelaku usaha di objek wisata Bukit Kasih, sasaran kegiatan ini untuk memfasilitasi masyarakat usia produktif dibekali dengan pelatihan guna meningkatkan keterampilan sesuai dengan kebutuhan sumberdaya manusia yang ada di sekitar objek wisata. Dinas Pariwisata Daerah Sulawesi Utara sebagai inisiator melihat kebutuhan wisatawan

terhadap oleh-oleh berupa kuliner sangatlah tinggi namun kenyataannya masih belum mencukupi. Mengapa masyarakat harus diberdayakan? Merupakan hal yang sangat penting di era modern persaingan pasar yang diminati adalah inovasi produk, melihat produk kemasan di Bukit Kasih yang tidak menarik dan hanya sekedar memasak tanpa harus adanya keahlian khusus. Beberapa komoditas seperti kacang dan jagung, adalah hasil pertanian dominan oleh masyarakat sekitar Bukit Kasih, hasil pertanian seperti itulah yang disajikan di Bukit Kasih sebagai produk kuliner. Melihat hasil pengolahan yang terkesan biasa saja, begitu juga seketika pandangan orang-orang terhadap penjual, bahwa penjual tidak menyediakan produk yang dihasilkan lewat kreatifitas. Makanya pemerintah melihat ini sebagai masalah sumber daya manusia, dan menjadi masalah yang krusial karena notabennya objek wisata religi Bukit Kasih ini menjadi salah satu ikon kebanggaan provinsi Sulawesi Utara yang menjadi pamor di Nusantara Indonesia sampai mancanegara. Intinya pengentasan kemiskinan ini yang menjadi masalah, SDM yang rendah tidak dapat menopang ekonomi namun jika diberdayakan, masyarakat mampu menghasilkan karya dan dapat berkompetisi. Seperti sasaran program destinasi oleh Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Utara terhadap sumber daya masyarakat sekitar objek wisata religi Bukit Kasih.

Berdasarkan rangkuman dari peneliti, permasalahan sumber daya

manusia di Bukit Kasih Kanonang, adalah sebagai berikut :

- a. Kesejahteraan terkait kemiskinan, umumnya komunitas usaha masyarakat Kanonang yang ada di Destinasi Wisata Religi Bukit Kasih adalah golongan masyarakat miskin atau masyarakat dengan tingkatan ekonomi yang rendah.
 - b. Kurangnya Pengetahuan dan Keterampilan, pada umumnya masyarakat pelaku usaha adalah masyarakat yang bukan dari golongan terpelajar atau akademisi, masyarakat masih mengandalkan pengalaman sendiri dan merasa kurang perlu adanya pelayanan prima, karena merasa pekerjaannya tidak harus di dasari dengan profesionalitas kerja.
 - c. Produk lokal kurang kompeten untuk dapat bersaing di pasaran, kurangnya kesadaran akan kompetensi dan adanya dorongan untuk dapat mengembangkan produk, juga karena di dasari oleh komunitas masyarakat *non-akademisi* .
3. Disposisi atau karakter pihak implementor dalam menjalankan program pengembangan destinasi lewat pelatihan kuliner di objek wisata Bukit Kasih. Peran penyelenggara program menjadi tolak ukur keberhasilan, penyelenggara yang jujur dan demokratis menjadi faktor penting agar tercapainya program yang tepat sasaran. Dinas Pariwisata, Pemerintah Desa dan Masyarakat Komunitas Penjual Bukit Kasih harus memiliki komitmen bersama. Agar selesainya pemberdayaan lewat pelatihan ini, masyarakat tetap konsisten dan lebih menghasilkan produk yang berkualitas.

4. Struktur Birokrasi, penyelenggaraan kebijakan ini terkait dengan mekanisme kerja dari pemerintah provinsi sesuai visi misi program operasi daerah selesaikan kemiskinan dalam pemberdayaan sumber daya manusia dan pengentasan kemiskinan, dimana Program Pengembangan Destinasi Dinas ini masuk dalam menunjang program pemerintah daerah. Dinas Pariwisata Daerah Provinsi Sulawesi Utara sebagai inisiator dalam pengembangan pariwisata di Bukit Kasih melaksanakan kegiatan “pelatihan kuliner dan pengemasan” dengan SOP sesuai struktur dari Dinas Pariwisata.

Saran

1. Implementor program destinasi yaitu Dinas Pariwisata Daerah Provinsi Sulawesi Utara telah merealisasikan kegiatan dalam pemberdayaan manusia pada tahun 2019 dalam upaya meningkatkan keterampilan dan dalam rangka pengentasan kemiskinan. Bagaimana keberlangsungannya, kenyataannya efek dari program tersebut kembali lagi kepada masyarakat yang bisa dilihat saat-saat sekarang. Masyarakat belum tentu mewujudkan *income* yang diharapkan. Karena melihat implementor belum jelas, apakah terus mengawasi guna melihat efeknya kedepan atau apakah hanya sebatas kegiatan seremoni untuk dokumentasi. Menurut sumber yang ada pada masyarakat, kegiatan tersebut tidak terlalu merubah alur perdagangan kuliner yang diharapkan menjadi lebih terampil, karena masyarakat pelaku usaha masih masih saja

- mempertahankan pengelolaan produk secara tradisional. Kebijakan ini harus terus diawasi, agar bukan hanya kegiatannya saja yang berhasil diadakan tapi bagaimana imbasnya kedepan. Apakah benar-benar kegiatan ini mempunyai impact kedepan atau tidak. Pengawasan dan koordinasi inilah yang harus di benahi.
2. Pengembangan sumber daya manusia dalam upaya pengentasan kemiskinan harus dilihat juga dari riset datanya kedepan, ini yang tidak dilihat jauh kedepan yaitu apakah benar-benar program pengembangan destinasi ini bisa di klaim keberhasilannya, atau hanya sekedar pemborosan anggaran. Implementor sampai ini tidak mempunyai update data terkait keberhasilannya. Melihat dari latar masalah ini, tujuan pengembangan ini masih mengambang kedepan karena tidak adanya monitorisasi data terkait keberhasilan program ini. Yang harus dilakukan adalah mengkritisi kinerja pihak implementor, pemerintah lokal dan pelaku usaha, masyarakat harus berperan aktif dalam melihat perkembangannya, jika tidak tepat sasaran masyarakat harus menyuarakan hak aspirasinya.
 3. Disposisi atau karakter dinas pariwisata daerah sebagai implementor program pengembangan destinasi dilihat dari bagaimana atensi penyelenggaran dan maksud tujuannya yang berhasil mengadakan kegiatan ini. Tapi masalah dilihat juga dari rangkaian peristiwa diatas. Apakah komitmen kerja dari pihak implementor ini terus ada, apakah selalu ada update dan evaluasi. Ini yang tidak

ditemukan sejak terlaksananya program ini pada tahun 2019. Update dan evaluasi kerja harus ada karena melihat efeknya kedepan apakah tepat sasaran.

4. Birokrasi pihak dinas pariwisata daerah provinsi sulawesi utara diharapkan kedepan terus dapat menjalin kerjasama antar pemangku kebijakan seperti pemerintah lokal dan masyarakat pelaku usaha di bukit kasih kanonang agar tetap adanya sinergitas kerja, karena tentu ada program-program yang mungkin masih dicanangkan kedepan. Menjaga keharmonisan ini sangat penting, agar kebijakan dapat terstruktur dan tepat sasaran karena adanya jalanin kerja sama antar pemangku kepentingan. Masyarakat tentu dapat menyerukan harapan-harapan untuk memajukan bersama Bukit Kasih Kanonang, aspirasi ini dapat dirangkul guna mewujudkan program-program yang lebih baik

. Daftar Pustaka

- Joko Widodo. 2011. *Implementasi Kebijakan. Pustaka Pelajar*, Manado.
- Nugroho, Riant, D, 2005. *Kebijakan Publik : Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi*. Jakarta: Elex Media Komputindo
- Perspektif Manajemen Sumber Daya Manusia Dalam Era Desentralisasi. Cetakan kedua. Manado : LP3AN FISIP UNPAD.
- Subarsono. 2005. *Analisa Kebijakan Publik*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta. Solly -Lubis. 2007. *Kebijakan Publik*. Mandar Maju. Manado.
- William N. Dunn. 2003. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*, Gadjadara University Press, Yogyakarta.
- Wahab, Solichin Abdul. 2001. *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
- suhendra, 2006. *Peranan Birokrasi dalam Pemberdayaan Masyarakat*. Bandung: Alfabeta.
- Kartasasmita, Ginjar 1995. *Pemberdayaan Masyarakat Sebuah Tinjauan Administrasi Pidato Pengakuan Jabatan Guru Besar Dalam Ilmu Administrasi Pada Fakultas Ilmu Administrasi*. Malang: Universitas Brawijaya.
- Sumaryadi, I Nyoman, 2005. *Perencanaan Pembangunan Daerah Otonom dan Pemberdayaan Masyarakat*. CV. Citra Utama, Jakarta
- I Gede Pitana., 2009. *Pengantar Ilmu Pariwisata*. Yogyakarta: Penerbit Andi
- Oka A. Yoeti. 1992. *Pengantar Ilmu Pariwisata*, Jakarta : Pradnya Paramita.
- Implementasi. Penerbit Kompas. Jakarta
- Hadinoto, Kusudianto. 1996. *Perencanaan Pengembangan Destinasi Pariwisata*. Jakarta: UI Press
- Pearce, D. 1981. *Tourist Development*. New Zealand : University of Cantenbury; miege, j . 1933. *La vie touristique en savoie*, revue de geographie alpine, 23, 749-817 and 1934, 24, 5-213 ; Miossec, j.m. (1976) *elements pour une theorie de*

l'espace touristique, les cashiers du tourisme, c-36, chet, aix-en-province.

Oka A. Yoeti. 1992. Pengantar Ilmu Pariwisata, Jakarta : Pradnya Paramita.

Hadinoto, Kusudianto. 1996. Perencanaan Pengembangan Destinasi Pariwisata. Jakarta: UI Press

Dwi Wulandari, 2015, "Kemenpar Rilis Lima Destinasi Wisata Kuliner Unggulan" November, hal.17

Sugiyono. (2013). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Manado: Alfabeta.CV

Moleong, 2003, *Metode Penelitian* Manado: PT. CitraAditya Bakti

Sugiyono, 2007, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D, Alfabeta, Manado

Sumber Undang-Undang:

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata

Peraturan Gubernur Provinsi Sulawesi Utara Nomor 53 Tahun 2008 Tentang Kepariwisata

Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Pemerintah Daerah.

Sumber Jurnal:

Dwijayanty, Ismail, Fanley N. P. 2021. "Peran Dinas Pariwisata Daerah Dalam Mengelola Sektor Pariwisata Di Kabupaten Kepulauan Sangihe" JURNAL GOVERNANCE Vol.1, No. 2, 2021 ISSN: 2088-281

Alfa, Agustinus Pati, Alfon. 2018. " Strategi Dinas Pariwisata Sulawesi Utara Dalam Pengelolaan Objek Wisata

Religius Bukit Kasih Toar"
Fakultas Ilmu Sosial dan Politik
Universitas Sam Ratulangi
EKSEKUTIFISSN : 2337-5736
Jurnal Jurusan Ilmu
Pemerintahan.